

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini dibuat sebagai langkah strategis untuk menata dan memberdayakan PKL dengan kerangka hukum yang jelas sekaligus memastikan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan ketertiban umum. Meskipun Perda ini sudah diterapkan, masih banyak PKL yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya terutama di kawasan Alun-Alun Singaparna seperti terdapat pembiaran dan tidak ada tindakan lebih lanjut oleh para pelaksana perda ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang kemudian teknik pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Hubberman.

Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *good governance*. Namun jika dikaitkan dengan teori *good governance* menurut UNDP dengan indikator yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, dan responsif dalam pelaksanaan Perda ini masih belum secara utuh diimplementasikan. Hal ini karena Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti belum bersinerginya antara pemerintah, Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan masyarakat yang berdampak rendahnya partisipasi masyarakat/PKL dalam pelaksanaan Perda, pemahaman masyarakat serta PKL yang belum memahami ketentuan dalam Perda serta inkonsistensi yang terjadi dalam penegakan perda ini menyebabkan pada lemahnya transparansi dan kepastian hukum sebagai landasan penting untuk menciptakan ketertiban, dan masih terbatasnya dukungan sarana-prasarana seperti lokasi bagi PKL akibat dari sinergi dan koordinasi antara pihak terkait belum berjalan dengan optimal menyebabkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Perda tersebut menjadi terhambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Good Governance*, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the principles of good governance in the policy issued by the Tasikmalaya Regency Government regarding Regional Regulation Number 12 of 2016 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This regulation was created as a strategic step to organize and empower street vendors with a clear legal framework while ensuring their welfare without neglecting public order. Although this regional regulation has been implemented, many street vendors still operate in areas not designated for them, especially in the Singaparna Square area, where there seems to be neglect and no further action taken by the implementers of this regulation, namely the Tasikmalaya Regency Government.

This research uses a qualitative research method with a case study approach. Through this research, it is hoped that we will be able to find out how good governance is implemented in Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) in the Singaparna Square Area, Tasikmalaya Regency. The sampling technique uses Purposive Sampling technique, then the data collection technique uses observation, interview and documentation methods as well as data processing and analysis in this research using the model from Miles and Hubberman.

The research findings indicate that the implementation of the principles of good governance in Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the organization and empowerment of street vendors has been carried out in line with the principles of good governance. However, when linked to the UNDP theory of good governance with its indicators participation, legal certainty, transparency, accountability, effectiveness and efficiency, and responsiveness—the full implementation of this regulation is still lacking. This is due to several challenges in the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2016, such as the lack of synergy between the government, the Street Vendors' Association (Paguyuban Pedagang Kaki Lima), and the community, which has resulted in low public/PKL participation in the implementation of the regulation. Furthermore, there is a lack of public understanding and a limited comprehension among street vendors (PKL) regarding the provisions of the regulation. In addition, inconsistencies in the enforcement of this regulation have led to weak transparency and legal certainty, which are fundamental foundations for creating order. Moreover, the limited availability of supporting infrastructure, such as designated locations for street vendors, further hampers the effectiveness and efficiency of implementing the regulation. This is largely because synergy and coordination among the relevant parties have not yet been fully optimized.

Keywords: Policy Implementation, Good Governance, Street Vendors